



Disampaikan dalam Lokakarya Evaluasi RPJPD, Satu Data, dan
Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045

Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berbasis Satu Data Provinsi Sulawesi Selatan

Kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistika dan Persandian Sulawesi Selatan dan ICRAF Indonesia

Makassar, 22-23 Februari 2023

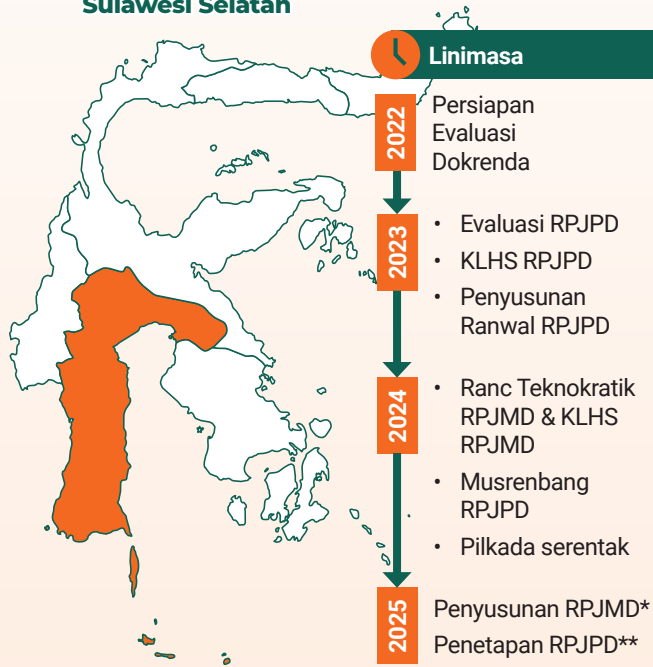
www.lahanuntukkehidupan.id

Bentang lahan berkelanjutan untuk
penghidupan berketahanan iklim di Indonesia



A. Selayang Pandang Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Sulawesi Selatan



*Sumber: Paparan Penyusunan Evaluasi RPJPD 2005-2025, Kemendagri, 2023.

Highlight Pembangunan



Kondisi Internal

- Sumber daya alam
- Daya dukung, daya tampung
- Pertumbuhan penduduk
- PDRB
- Sosial ekonomi
- Iklim bisnis lokal



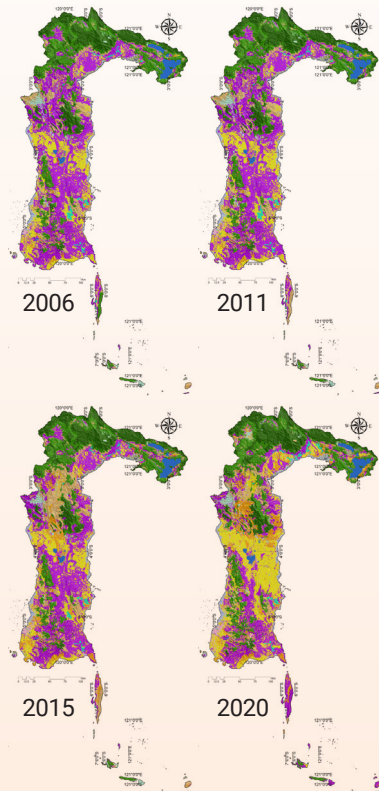
Faktor eksternal

- Prioritas dan proyek strategis nasional
- Kondisi geopolitik
- Perubahan iklim
- Nilai ekonomi karbon
- Krisis pangan
- Potensi resesi global

Profil Pembangunan Sulawesi Selatan

- Dalam 20 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan telah melalui berbagai perubahan dan kegiatan pembangunan yang tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi, tapi juga bentang lahan.
- Kontribusi PDRB paling besar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau ekonomi berbasis pengelolaan lahan.
- Komoditas perkebunan seperti kakao, kelapa, kelapa sawit, dan kopi masih merupakan komoditas unggulan dalam satu dekade terakhir.

Dinamika Bentang Lahan

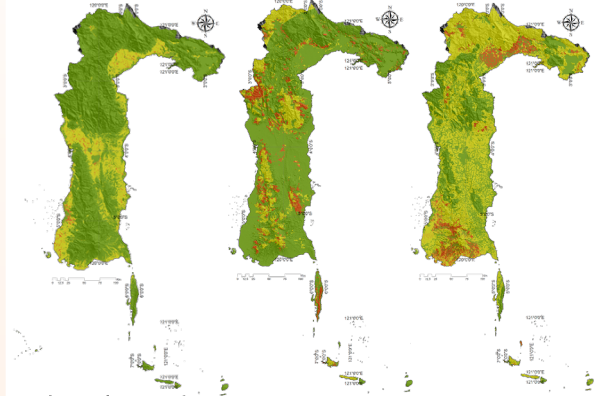


*Sumber: Peta tutupan/penggunaan lahan, KLHK.

Legend

- Hutan lahan kering primer
- Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan
- Hutan rawa primer
- Hutan rawa sekunder / bekas tebangan
- Hutan mangrove primer
- Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan
- Hutan tanaman
- Perkebunan / Kebun
- Semak belukar
- Semak belukar rawa
- Savanna / Padang rumput
- Pertanian lahan kering
- Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur
- Sawah
- Tambak
- Permukiman / Lahan terbangun
- Transmigrasi
- Lahan terbuka
- Pertambangan
- Tubuh air
- Rawa
- Bandara / Pelabuhan

- Tutupan hutan 2006-2020 mengalami penurunan sekitar 0,12%.
- Dalam jangka 20 tahun, luas pertanian meningkat 13,6%.
- Sebesar 13,47% luas kebun campur mengalami penurunan, tercatat sebagai penurunan kelas tutupan lahan tertinggi sepanjang periode 20 tahun terakhir.



Legend

- Risiko bencana
- Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

*Sumber: Peta risiko bencana, inarisk BNPB.

- Peta risiko rawan banjir menunjukkan area rawan banjir tinggi berada pada area perkotaan atau padat penduduk.
- Risiko rawan karhutla menyebar hampir di setiap kabupaten. Tana Toraja, Bone dan Barru menjadi kabupaten dominan risiko rawan karhutla.
- Risiko rentan kekeringan dominan berada pada area sebelah utara dan selatan provinsi. Secara topografi berada pada area rendah dan berada pada area padat aktivitas pertanian dan perkebunan.

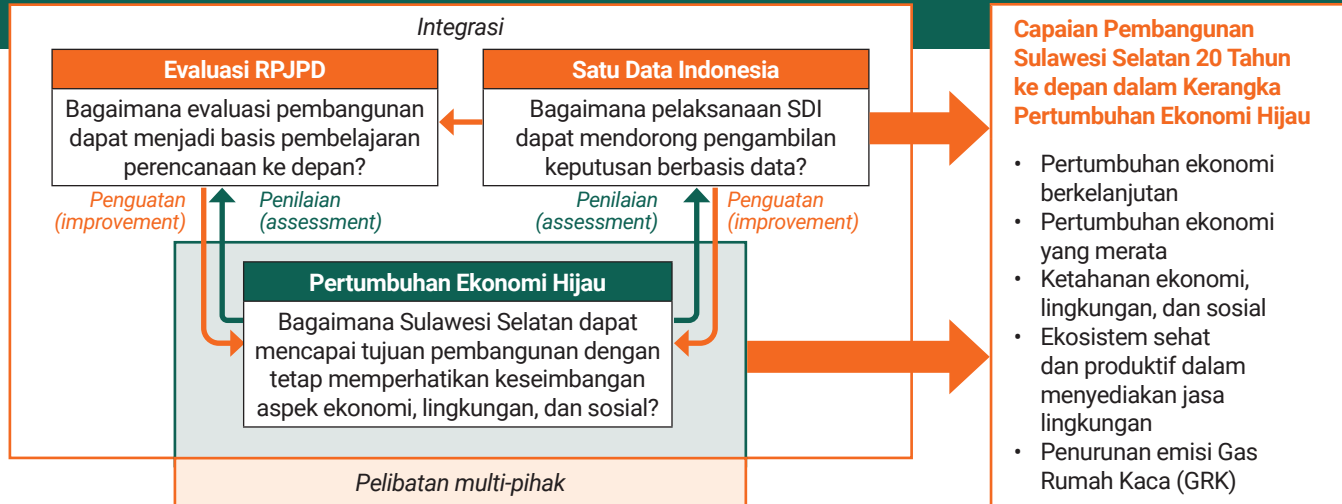
B. Pengertian dan Ruang Lingkup



C. Kerangka Pikir Integrasi



Menuju Transformasi Ekonomi Hijau di Provinsi Sulawesi Selatan





D. Pemetaan Sasaran Pokok RPJPD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Satu Data Indonesia

Misi/Sasaran Pokok RPJPD	Sasaran Pokok RPJPN	Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Satu Data Indonesia
Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. - Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila		Mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui ketersediaan data dan informasi geospasial dan statistik
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar - Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat - Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pemecahan masalah lintas daerah	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	- T.15. Menetapkan pembayaran jasa lingkungan - T.16. Mempercepat pembayaran ganti rugi karbon internasional dan domestik - T.17 Memobilisasi pendanaan karbon hutan	- Pengelolaan data - Penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu - Aksesibilitas data dan keterbukaan berbagipakai data - Transparansi data
Misi 3: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif	Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah		

Sumber: Peta Jalan
Pertumbuhan Ekonomi
Hijau Nasional

Sumber: Perpres
39/2019 tentang Satu
Data Indonesia

Misi/Sasaran Pokok RPJPD	Sasaran Pokok RPJPN	Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Satu Data Indonesia
Misi 4: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan - Tumbuhnya rumpun industri yang kuat dan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif - Tersedianya pasokan listrik dan energi dari berbagai sumber dengan jaringan yang menjangkau seluruh wilayah - Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis	- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi - Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.	- T.3. Peningkatan nilai tambah dalam ekstraksi mineral - T.5. Mengembangkan sektor teknologi bersih - T.14. Mengidentifikasi pasar berbasis modal alam yang baru - T.11. Mengembangkan rantai pasokan yang berkelanjutan - T.1. Meningkatkan akses ke layanan energi modern di daerah pedesaan terpencil Indonesia - T.1. Meningkatkan akses ke layanan energi modern di daerah pedesaan terpencil Indonesia - T.2. Mengarahkan sektor energi menuju sumber energi rendah karbon - T.4. Meningkatkan efisiensi energi - T.6. Mempromosikan pengolahan limbah yang lebih baik - T.9. Memperbaiki pengelolaan hutan dan lahan - T.10. Mengamankan ekosistem laut	Data-Driven Policy Making  Big Data Analysis  Modelling  Artificial Intelligent  Viz/Dash-board Prinsip Satu Data  Standar Data  Kode Referensi  Metadata  Interop
Misi 5: Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksi maritim di Indonesia Timur	Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.	- T.8. Membangun koneksi antar moda - T.10. Mengamankan ekosistem laut	

Selengkapnya pemetaan sasaran pokok RPJPD Sulsel 2005-2025 dapat dilihat pada tautan berikut: bit.ly/taggingrpjpsulsel

E. Pemetaan Pilar dan Indikator

Evaluasi RPJPD mengedepankan pengukuran efektivitas transformasi ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan **Indeks Ekonomi Hijau**.

Indikator ini menilai interaksi sosial-ekonomi-lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik ke depannya.

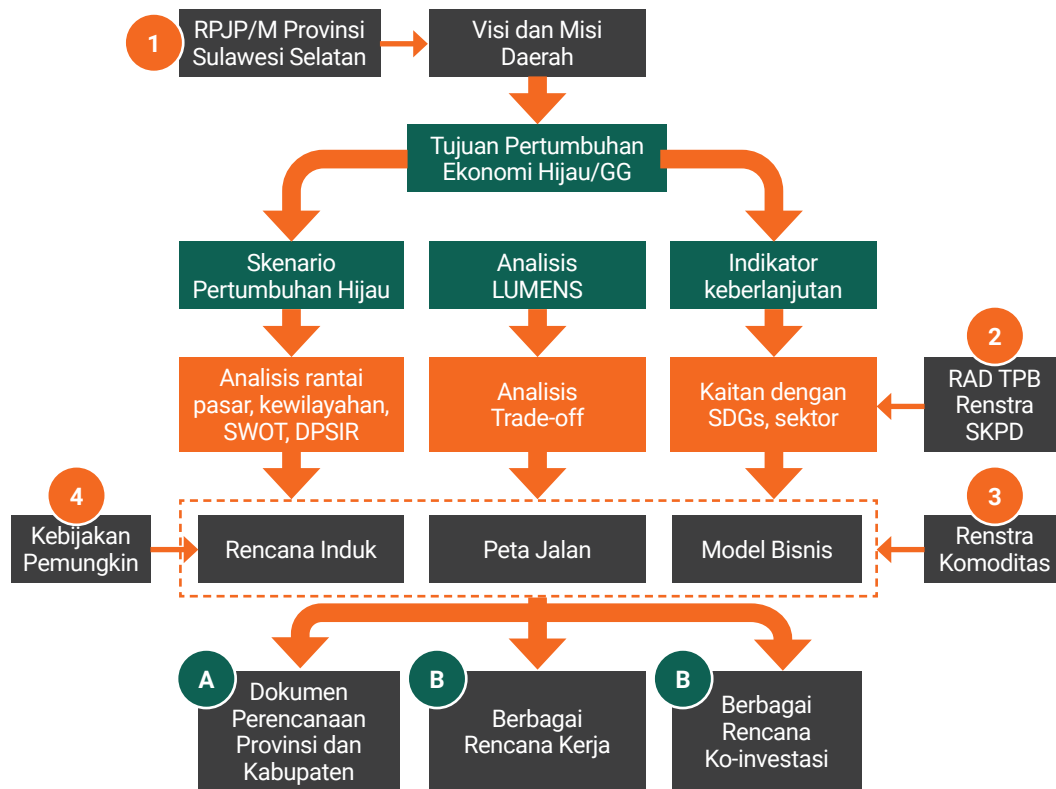
Pilar	Indikator	Indikator RPJPD
Sosial	☐ Rata-rata lama sekolah	✓
	☐ Angka harapan hidup	✓
	☐ Tingkat kemiskinan	✓
	☐ Tingkat pengangguran terbuka	✓
Lingkungan	☐ Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia	
	☐ Bauran energi baru terbarukan dari energi primer	
	☐ Persentase sampah terkelola	✓
	☐ Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	✓
	☐ Penurunan tutupan lahan gambut	
Ekonomi	☐ Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	
	☐ Produktivitas tenaga kerja sektor industri	
	☐ Produktivitas pertanian	✓
	☐ Pendapatan nasional bruto per kapita	✓
	☐ Intensitas energi final	
	☐ Intensitas emisi	



F. Tahapan Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Planning*)

Relevansi dalam perencanaan jangka panjang

- Rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau merupakan bagian dari proses perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen lain baik yang dihasilkan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Posisi rencana induk dan peta jalan dapat dilihat dalam menerima masukan (1-4) dari dokumen lain maupun berkontribusi sebagai masukan untuk penyusunan dokumen lain (A-C).





Land4Lives

#LahanUntukKehidupan

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

World Agroforestry (ICRAF) Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415; fax: +(62) 251 8625416 | www.worldagroforestry.org/country/Indonesia

www.lahanuntukkehidupan.id